

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang 2022)

The Effect Of Application Of Government Accounting Standards, Regional Financial Accounting Systems, Internal Control Systems, And Human Resource Competence On The Quality Of Financial Reports

(Study on Regional Work Units of Karawang Regency 2022)

Muhammad Fadhil Syafiq Ramadhan¹, Dini Wahjoe Hapsari²

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, syafiqf@student.telkomuniversity.ac.id

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, dinihapsari@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Analisis data penelitian menggunakan statistic deskriptif, uji validitas dan reliabilitas serta uji asumsi klasik. Dari metode tersebut diperoleh 12 instansi dan 36 sampel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada pegawai pembuat laporan keuangan. Penerapan standar akuntansi pemerintah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi penerapan SAP akrual maka semakin besar pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan kata lain, semakin baik staf keuangan dan akuntansi mematuhi standar akuntansi pemerintah, semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena didukung oleh sebagian besar karakteristik kepala departemen keuangan yang memiliki pengalaman sebelumnya dalam menyusun laporan keuangan dan yang telah bekerja lebih dari 10 tahun. Penerapan sistem pengendalian internal dan kompetensi SDM dalam penelitian ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci-kompetensi sumber daya manusia, kualitas laporan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal

Abstract

This study aims to determine the effect of applying government accounting standards, regional financial accounting systems, internal control systems, and human resource competence on the quality of financial reports in the Regional Work Units of Karawang Regency. The research method used in this study is a quantitative method with a sample selection technique using purposive sampling. Analysis of research data using descriptive statistics, validity and reliability tests and classic assumption tests. From this method, 12 instances and 36 samples were obtained. The type of data used is secondary data by using a questionnaire that is distributed to employees who make financial

reports. The application of government accounting standards has a positive and significant influence on the quality of local government financial reports. The higher the application of accrual SAP, the greater the effect on the quality of financial statements. In other words, the better finance and accounting staff comply with government accounting standards, the better the quality of local government financial reports. The implementation of the regional financial accounting system has a positive and significant influence on the quality of local government financial reports because it is supported by most of the characteristics of heads of finance departments who have previous experience in preparing financial reports and who have worked for more than 10 years. The application of internal control systems and human resource competencies in this study did not have a significant effect on the quality of local government financial reports.

Keywords-application of government accounting standards, human resource competence, internal control systems, quality of financial reports, and regional financial accounting systems

I. PENDAHULUAN

Gubernur, Bupati, dan Walikota mengelola pemerintahan daerah dengan menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat melalui DPRD yang sebelumnya telah diaudit oleh BPK (Nasution, 2020). Mengingat akan banyak pihak yang memanfaatkan data dari laporan keuangan tersebut, maka pemerintah daerah dalam hal ini Bupati berkewajiban untuk memberikan informasi yang berkualitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71/2010, pihak yang menggunakan laporan keuangan pemerintah adalah masyarakat, wakil rakyat, lembaga inspeksi, dan lembaga pengawas (Ikyarti & Aprila, 2019). Sistem pengendalian intern berperan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Sistem pengendalian intern bertindak sebagai pengontrol dan pengawas dalam penyusunan laporan keuangan, memastikan bahwa laporan tersebut disusun dengan benar, tepat waktu, sesuai anggaran, dan sesuai dengan standar untuk memperoleh opini audit yang menguntungkan. Akibatnya, sistem pengendalian internal diduga mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Literasi dan pemahaman akuntansi mutlak diperlukan bagi penulis laporan keuangan karena kepatuhan terhadap standar akuntansi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah dan didukung oleh sistem akuntansi yang handal. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dimana SAP mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Baik bentuk maupun isi laporan pertanggungjawaban sama untuk Pendapatan dan Belanja Negara. Hasil pemeriksaan BPK dapat menunjukkan tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah. Untuk memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, dilakukan pemeriksaan atas laporan tersebut. Kriteria pemberian opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pernyataan Profesi Pemeriksa.

Pada 2021, Menteri Keuangan menyatakan meskipun Indonesia berangsur bangkit dari pelemahan perekonomian, pemerintah daerah tetap meningkatkan kinerjanya dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Tahun ini BPK mencatat adanya kenaikan sebesar 2,55% pemerintah daerah mendapatkan opini WTP. Opini WTP menjadi indikator penting kualitas laporan keuangan pemerintahan. Kabupaten Karawang merupakan salah satu instansi yang memiliki kualitas laporan keuangan yang baik selama beberapa tahun terakhir mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. akan tetapi, meskipun telah memiliki opini WTP kabupaten Karawang memiliki beberapa masalah yang membuat pertanyaan apakah opini yang telah diberikan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Beberapa masalah yang dialami oleh kabupaten Karawang seperti adanya temuan kelebihan volume proyek Pembangunan sebesar Rp 600.555.687 dan terdapat penurunan PDB yang besar sehingga memiliki pengaruh pada perekonomian (Bachtiar, 2022).

Penelitian ini dilakukan di SKPD Kabupaten Karawang, karena walaupun telah memiliki predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI, laporan keuangan yang berkualitas tinggi penting untuk menjaga perekonomian yang efisien dan berkelanjutan, serta akuntabilitas. sehingga laporan keuangan bukan sekedar laporan tetapi juga memiliki tujuan agar para pemangku kepentingan terhindar dari kecurangan dan penyimpangan. Giovani (2015) menegaskan bahwa laporan keuangan yang memuaskan harus memiliki karakteristik kualitatif yang diperlukan. Agar informasi akuntansi dapat mencapai tujuannya, ia harus memiliki karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai ukuran normatif. Sebagai entitas pelaporan dan akuntansi, pemerintah daerah

dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menetapkan sistem akuntansi sesuai dengan PP 71 Tahun 2010. Karena kewajiban tersebut, sistem akuntansi kas menuju akrual yang selama ini digunakan harus disesuaikan. sesuai dengan persyaratan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menuju sistem akuntansi berbasis akrual. Pemerintah daerah harus menyiapkan sumber daya yang cukup karena penyesuaian ini berdampak pada perubahan atau penyesuaian sistem administrasi keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti SKPD Kabupaten Karawang. Adanya informasi yang tidak berimbang antara opini WTP, kondisi permasalahan perekonomian serta kasus yang ada membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan secara langsung. Dalam hal ini peneliti juga akan mengetahui alasan mengapa BPK mengeluarkan opini WTP meskipun terdapat pos-pos material yang menjadi masalah pada SKPD Karawang.

II. TEORI

A. Dasar Teori

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kinerja SKPD menjadi sebuah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan juga tujuan sebagai bagian dari visi, misi serta strategi instansi pemerintah daerah yang dapat menjadi ukuran keberhasilan atau kegagalan akan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah (Putra, 2013). Dalam struktur pemerintah daerah, SKPD adalah entitas akuntansi yang berkewajiban dalam menyusun pencatatan atas transaksi pendapatan, belanja, asset dan juga selian kas yang terjadi di lingkungan SKPD, setiap bagiannya harus diisi oleh orang yang tepat yakni yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan (Diani, 2014).

2. Standar Akuntansi Pemerintah

SAP merupakan prosedur manual ataupun komputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan hingga pelaporan posisi keuangan pemerintah, dan pemerintah pusat atau daerah melakukan penyusunan sistem akuntansi pemerintah yang mengacu pada SAP (Sadat, 2020). Kedudukan SAP ialah sebuah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan pemerintah.

3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari porses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan dan juga pelaporannya dalam rangka melaksanakan APBD, yang dilaksanakan sejalan dengan prinsip akuntansi sebagaimana diatur dalam Kepmendagri No. 29/2002. Sementara itu, Permendagri No. 13/2006 menyatakan unsur-unsur SAKD terdiri dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran hingga pelaporan keuangan yang bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan memberikan kebebasan untuk menggunakan aplikasi komputer ataupun secara manual (Hanifa, 2016). Konsep SAKD juga sejalan dengan konsep sistem akuntansi pemerintahan. SAKD ini dilakukan dengan menggunakan catatan seperti buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal umum, buku jurnal pengeluaran kas, buku besar serta buku besar pembantu. Hasil dari SAKD adalah berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan mengenai realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan (Halim, 2007).

4. Sistem Pengendalian Internal

Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), pengendalian internal diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen serta personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mencapai tujuan efektivitas dan efisiensi operasi keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku (Dharmawan & Supriatna, 2016). SPI secara menyeluruh diselenggarakan di lingkungan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, yang mana bukan hanya sekedar memeriksa kebenaran angka, pengendalian internal juga memperhatikan struktur organisasi perusahaan, meningkatkan efisiensi kinerja serta menganalisis keberhasilan dari suatu kebijakan manajemen, sehingga SPI perlu dimonitor serta dievaluasi agar dapat dipertanggungjawabkan (Damayanti, 2020). UU No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengartikan SPI sebagai porses integral pada kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin dan pegawai secara terus menerus guna memberikan keyakinan yang memadai karena tujuan organisasi yang telah tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, asset negara, serta tingkat ketaatan pada aturan perundang-undangan (B. Purba et al., 2021).

5. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Keberadaan sumber daya dalam sebuah organisasi menjadi hal penting yang harus diperhitungkan, dimana sumber daya manusia ialah kemampuan dari daya fisik dan daya pikir yang dimiliki setiap individu, perilaku serta sifatnya yang ditentukan oleh lingkungan dan keturunannya, atau prestasi kepuasannya. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat terlihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki seseorang, atau pelatihan yang pernah diikuti, maupun keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas dan juga deskripsi jabatan. Kompetensi dimaksudkan sebagai karakteristik dasar yang dimiliki seseorang yang akan memungkinkan mereka dapat mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. UU No. 13/2003 mengartikan kompetensi sebagai kemampuan kerja individu yang terdiri dari aspek pengetahuan, keterampilan serta sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan (Yusup, 2021).

6. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan dengan informasi akuntansi yang tersedia. Informasi tersebut berisi tentang komponen-komponen laporan keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan indikator kualitas laporan keuangan yaitu relevan, andal, mudah dipahami dan dapat dibandingkan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun dengan berpedoman pada SAP. LKPD yang memiliki kualitas baik harus memenuhi kriteria sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang telah menerapkan empat kriteria tersebut maka dapat dikatakan laporan keuangannya transparan dan akuntabel. PP no. 71/2010 mendefinisikan laporan keuangan sebagai laporan terstruktur tentang posisi keuangan dan juga transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan, sementara karakteristik kualitatif laporan keuangan dimaksudkan sebagai ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuan organisasi (Defitri, 2018).

B. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

PP No. 24/2004 berisikan prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, artinya SAP menjadi syarat yang berkekuatan hukum dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Nugraheni & Subaweh, 2008).

Sejalan dengan penjelasan tersebut, penelitian (Jauhari et al., 2021) membuktikan bahwa SAP mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan dengan hal tersebut, kualitas laporan keuangan harus tetap dijaga. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian milik (Kiranayanti & Erawati, 2016) yang menyatakan bahwa SAP berbasis akrual berpengaruh positif signifikan pada kualitas laporan keuangan, dimana semakin tinggi penerapan SAP berbasis akrual, akan semakin tinggi pula pengaruhnya kepada kualitas laporan keuangan. Dua penelitian tersebut didukung pula oleh penelitian (Pujanira & Taman, 2017) yang menyimpulkan bahwa diterapkannya SAP memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

SAKD diperlukan untuk mengelola informasi akuntansi karena mampu memberikan output data berupa laporan keuangan pemerintah daerah, berperan penting untuk mencapai sistem akuntabilitas publik dan transparansi (R. B. Purba, 2018). Penelitian Jauhari et al., (2021) membuktikan bahwa SAKD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, artinya kualitas LKPD yang dihasilkan sangat dibantu oleh SAKD yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang menjadi objek penelitian dalam mengelola laporan keuangan. Kemudian, penelitian serupa dilakukan oleh Ismail (2021) yang menyaratkan bahwa SAKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, ketika SAKD diterapkan dengan baik, maka akan semakin berkualitas laporan keuangan yang disajikan, sehingga penerapan SAKD yang baik dan benar akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

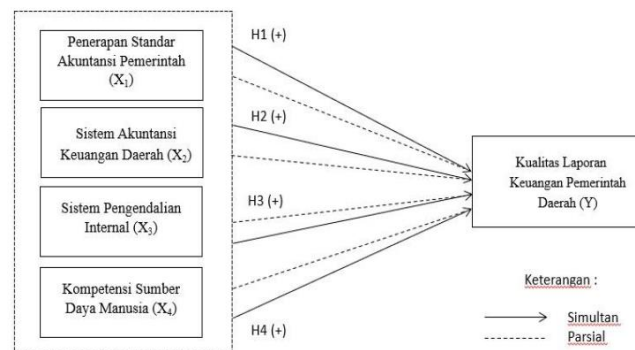
Diatur dalam PP 60/2008, SPI berkaitan dengan tiga kebijakan yaitu berkaitan dengan catatan keuangan; memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan juga penerimaan dan pengeluaran yang sesuai dengan otorisasi; serta meyakini akan keamanan asset yang berdampak pada laporan keuangan pemerintah (Armando, 2013).

Penelitian Bagjana & Rachman (2021) dan Kiranayanti & Erawati (2016) memiliki kesamaan atas hasil penelitian yang menunjukkan bahwa SPI memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi penerapan SPI, maka akan semakin tinggi pula pengaruh yang akan diberikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini karena SPI berperan dalam meningkatkan kinerja, akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan negara.

4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi SDM menjadi dasar seseorang untuk mencapai kinerja yang tinggi sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efektif, dimana SDM yang tidak berkompeten tidak akan mampu mengerjakan pekerjaannya secara efektif, efisien dan ekonomis, pun hasil pekerjaannya tidak akan tepat waktu sehingga terjadi pemborosan waktu dan tenaga. Lain halnya jika pekerjaan dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten, akan membuat laporan keuangan yang lebih cepat (Nilamsari dkk., 2021).

Dibawah ini merupakan kerangka pemikiran yang menjadi sebuah ringkasan dari penjelasan akan hubungan yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

Mendasarkan pada pendekatan, secara garis besar penelitian dibedakan menjadi penelitian kuantitatif dan kualitatif yang masing-masing memiliki tujuan, karakteristik dan prosedur yang berbeda. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang akan menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif verifikatif. Penelitian ini merupakan penelitian serupa yang dilakukan oleh Mahtovani & Hapsari (2020) yang menggunakan deskriptif verifikatif bersifat klausul untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sampel yang berhasil dikumpulkan pada penelitian ini adalah sebanyak 36 orang yang menjabat sebagai bagian keuangan Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang. Karakteristik responden yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan diklasifikasikan menurut jenis kelamin, umur, latar belakang pendidikan, lama bekerja, posisi atau jabatan, kategori organisasi perangkat daerah dan nama organisasi perangkat daerah. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terhadap pemerintah daerah kabupaten Karawang, maka didapatkan data demografi responden berdasarkan jenis kelamin, umur, jabatan, lama bekerja, latar belakang Pendidikan, dan kategori OPD.

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Deskriptif

a. Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan jumlah skor kualitas laporan keuangan adalah sebesar 1800. Jumlah skor tersebut jika dimasukkan kedalam garis kontinum adalah sebagai berikut:

Nilai Indeks Maksimum : $5 \times 10 \times 36 = 1800$

Nilai Indeks Minimum : $1 \times 10 \times 36 = 360$

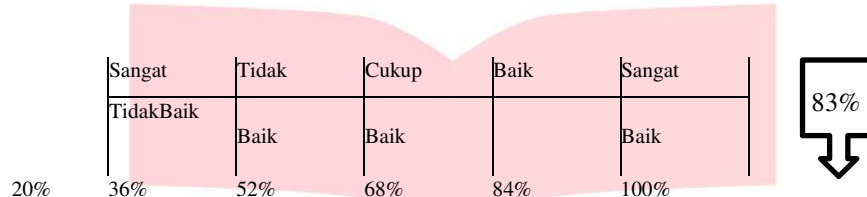
Jarak Interval : $(\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}) / 5$
: $(1800 - 360) / 5$

: 288

Presentase Skor : $(\text{total skor} : \text{nilai maksimum}) \times 100\%$

: 83%

Berdasarkan hasil skor tanggapan responden terhadap kualitas laporan keuangan maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:



Gambar 4.7 Garis Kontinum Skor Tanggapan Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan analisis deskriptif diatas mengenai tanggapan responden terhadap kualitas laporan keuangan maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Karawang baik. Respon tersebut didukung oleh jawaban responden yang menyetujui bahwa Indikator andal dan dapat dibandingkan dengan skor 83%.

b. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan jumlah skor standar akuntansi pemerintah adalah sebesar 1080. Jumlah skor tersebut jika dimasukkan kedalam garis kontinum adalah sebagai berikut:

Nilai Indeks Maksimum : $5 \times 6 \times 36 = 1080$

Nilai Indeks Minimum : $1 \times 6 \times 36 = 216$

Jarak Interval : $(\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}) / 5$
: $(1080 - 216) / 5$

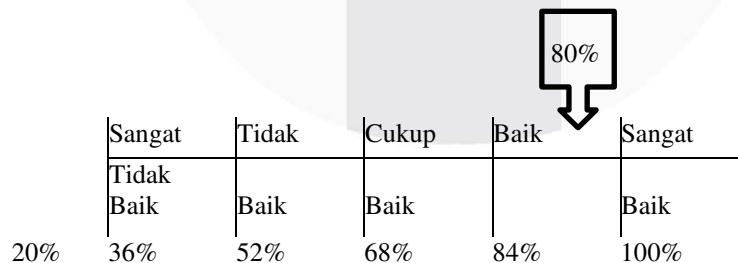
: 172,8

Persentase Skor : $(\text{total skor} : \text{nilai maksimum}) \times 100\%$

: $(861 / 1080) \times 100\%$

: 79,7%

Berdasarkan hasil skor tanggapan responden terhadap sistem akuntansi pemerintah maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:



Gambar 4.8 Garis Kontinum Skor Tanggapan Sistem Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan analisis deskriptif diatas mengenai tanggapan responden terhadap sistem akuntansi pemerintah maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pemerintah Kabupaten Karawang baik. Respon tersebut didukung oleh jawaban responden yang menyetujui bahwa indikator staff keuangan dan akuntansi telah mencatat dengan baik sehingga didapat skor 80%.

c. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan jumlah skor sistem akuntansi keuangan adalah sebesar 1440. Jumlah skor tersebut jika dimasukkan kedalam garis kontinum adalah sebagai berikut:

Nilai Indeks Maksimum : $5 \times 8 \times 36 = 1440$
 Nilai Indeks Minimum : $1 \times 8 \times 36 = 288$
 Jarak Interval : $(\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}) / 5$
 : $(1440 - 288) / 5$
 : 230,4
 Persentase Skor : $(\text{total skor} : \text{nilai maksimum}) \times 100\%$
 : $(1218 / 1440) \times 100\%$
 : 84,5%

Berdasarkan hasil skor tanggapan responden terhadap sistem akuntansi keuangan maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:



Gambar 4. 9 Garis Kontinum Skor Tanggapan Sistem Akuntansi Keuangan

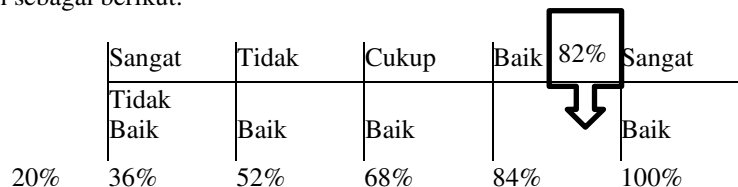
Berdasarkan analisis deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan Kabupaten Karawang sangat baik. Respon tersebut didukung oleh jawaban responden yang menyetujui bahwa indikator staff keuangan dan akuntansi telah mencatat dengan baik sehingga didapat skor 85%.

d. Sistem Pengendalian Intenal

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan jumlah skor sistem pengendalian internal adalah sebesar 1620. Jumlah skor tersebut jika dimasukkan kedalam garis kontinum adalah sebagai berikut:

Nilai Indeks Maksimum : $5 \times 9 \times 36 = 1620$
 Nilai Indeks Minimum : $1 \times 9 \times 36 = 324$
 Jarak Interval : $(\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}) / 5$
 : $(1620 - 324) / 5$
 : 259,2
 Persentase Skor : $(\text{total skor} : \text{nilai maksimum}) \times 100\%$
 : $(1333 / 1620) \times 100\%$
 : 82,2%

Berdasarkan hasil skor tanggapan responden terhadap sistem pengendalian internal maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:



Gambar 4. 10 Garis Kontinum Skor Tanggapan Sistem Pengendalian Internal

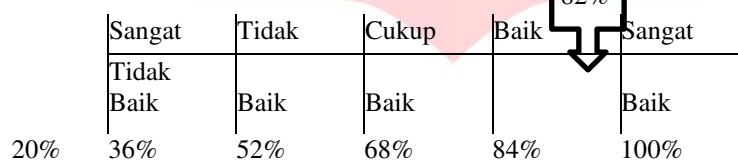
Berdasarkan analisis deskriptif diatas mengenai tanggapan responden terhadap sistem pengendalian internal maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal Kabupaten Karawang baik. Respon tersebut didukung oleh jawaban responden yang menyetujui bahwa indikator staff keuangan dan akuntansi telah melakukan risiko pencegahan terjadinya kesalahan dalam membuat laporan.

e. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil pengolahan data pada yang dilakukan oleh peneliti didapatkan jumlah skor sistem akuntansi pemerintah adalah sebesar 1260. Jumlah skor tersebut jika dimasukkan kedalam garis kontinum adalah sebagai berikut:

Nilai Indeks Maksimum : $5 \times 7 \times 36 = 1260$
 Nilai Indeks Minimum : $1 \times 7 \times 36 = 252$
 Jarak Interval : $(\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}) / 5$
 : $(1260 - 252) / 5 = 201,6$ Persentase Skor
 : $(\text{total skor} : \text{nilai maksimum}) \times 100\%$
 : $(1031 / 1260) \times 100\% = 81,8\%$

Berdasarkan hasil skor tanggapan responden terhadap kualitas sumber daya manusia maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:



Gambar 4. 11 Garis Kontinum Skor Tanggapan Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan analisis deskriptif diatas mengenai tanggapan responden terhadap kualitas sumber daya manusia maka dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia Kabupaten Karawang baik dan skor didapat 82%. Respon tersebut didukung oleh jawaban responden yang menyetujui bahwa indikator staff keuangan dan akuntansi telah membuat laporan sesuai standar yang berlaku dan memahami organisasi dengan baik.

2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji reliabilitas digunakan pada penelitian yang menggunakan kuesioner (Hidayat, 2021). Berikut merupakan hasil perhitungan uji validitas. Hasil menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai $> 0,30$ sehingga dapat dikatakan semua variabel valid sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan pada penelitian yang menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha. Berikut merupakan hasil perhitungan uji reliabilitas. Hasil menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai $> 0,60$ sehingga dapat dikatakan semua variabel reliabilitasnya baik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut (Hidayat, 2021).

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 4.9 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.72952473
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.079
	Negative	-.060
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan data kuesioner dari 36 responden diketahui bahwa nilai signifikansi residual regresi yang terbentuk lebih besar dari taraf nyata 5% yaitu sebesar 0.200 ($0,200 > 0,05$), sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas tersebut terpenuhi atau berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Multikolinearitas

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	18.147	5.893		3.080	.004		
	SAP	.496	.312	.311	2.590	.012	.517	1.933
	SAKD	.368	.268	.349	2.375	.018	.307	3.258
	SPI	-.170	.186	-.216	-.912	.377	.352	2.839
	KSDM	.181	.275	.181	1.660	.514	.264	3.787

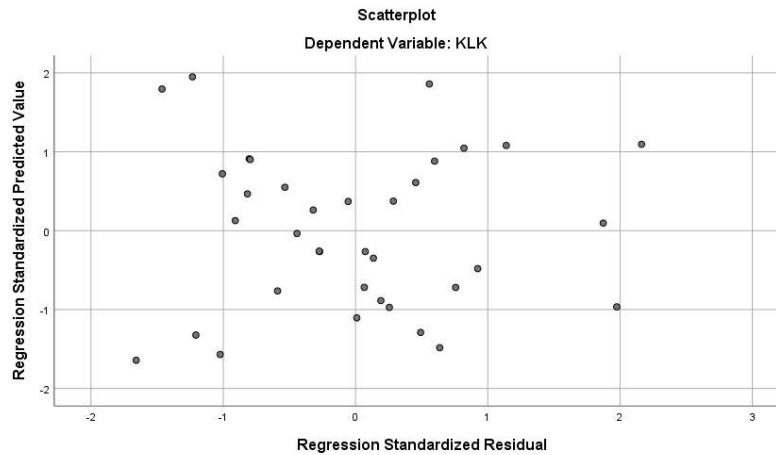
a. Dependent Variable: KLK

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.8 diketahui bahwa nilai VIF < 10 atau nilai Tolerance $> 0,01$. Tabel 4.8 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam data penelitian sehingga penelitian dapat dilanjutkan.

c. Uji Heterokedastisitas

Gambar 4.11 Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data diolah (2022)

4. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.11 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	18.147	5.893		.004
	SAP	.496	.312	.311	.012
	SAKD	.368	.268	.349	.018
	SPI	-.170	.186	-.216	.377
	KSDM	.181	.275	.181	.514

a. Dependent Variable: KLIK

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi terlihat bahwa variabel yang memiliki koefisien beta tertinggi terdapat pada variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dengan nilai koefisien beta sebesar 0,496. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

b. Uji F

Tabel 4.12 Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	163.545	4	40.886	4.861	.004 ^b
	Residual	260.761	31	8.412		
	Total	424.306	35			

a. Dependent Variable: KLK

b. Predictors: (Constant), KSDM, SAP, SPI, SAKD

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai F hitung sebesar 4,861. Nilai ini lebih besar dari F tabel (4,861 > 2,649) dan nilai sig. F (0,004) lebih kecil dari α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

c. Koefisiensi Determinasi (R^2)Tabel 4.13 Analisis Koefisiensi Determinasi (R^2)**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.621 ^a	.385	.306	2.900

a. Predictors: (Constant), KSDM, SAP, SPI, SAKD

b. Dependent Variable: KLK

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan analisis diperoleh nilai R Square sebesar 38,5 atau 38,5%. Artinya bahwa keragaman Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Karawang dipengaruhi oleh 38,5% variabel bebas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Sedangkan sisanya (100%-38,5%) yaitu sebesar 61,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.

d. Uji T

Tabel 4.14 Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.147	5.893		3.080	.004
	SAP	.496	.312	.311	2.590	.012
	SAKD	.368	.268	.349	2.375	.018
	SPI	-.170	.186	-.216	-.912	.377
	KSDM	.181	.275	.181	1.660	.514

a. Dependent Variable: KLIK

Sumber: Data diolah (2022)

- 1) Standar Akuntansi Pemerintah. Berdasarkan hasil analisis regresi, nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar (0,012 < 0,05) pada variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Standar Akuntansi Pemerintah memberikan pengaruh positif signifikan terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 2) Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil analisis regresi, nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar (0,018 < 0,05) pada variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Standar Akuntansi Keuangan Daerah memberikan pengaruh positif signifikan terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 3) Sistem Pengendalian Internal. Berdasarkan hasil analisis regresi, nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu sebesar (0,377 > 0,05) pada variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa secara parsial variabel Sistem Pengendalian Internal tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 4) Kompetensi Sumber Daya Manusia. Berdasarkan hasil analisis regresi, nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu sebesar (0,514 > 0,05) pada variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa secara parsial variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis kualitas laporan keuangan Kabupaten Karawang pada tahun 2021 yang merupakan salah satu pemerintah daerah dengan opini WTP dari BPK. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Hasil analisis deskriptif dari setiap variabel:

1. Penerapan kualitas laporan keuangan Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa persentase skornya 83% Hal ini dapat disimpulkan bahwa pimpinan dan anggota serta staff pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang telah mampu dalam menerapkan indikator relevan, andal, dapat di bandingkan, dan dapat di pahami sebagai tolak ukur untuk menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010.
2. Penerapan standar akuntansi pemerintah Kabupaten Karawang berada pada persentase 79,7% Hal ini dapat disimpulkan bahwa anggota pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten karawang telah memahami mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku pada saat menyusun pelaporan keuangan.
3. Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah Kabupaten Karawang sebesar 84,5% Hal ini dapat disimpulkan bahwa anggota pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten karawang sudah mampu dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya dalam menyesuaikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku dan menyusun laporan keuangan dengan baik dan benar.
4. Penerapan sistem pengendalian internal Kabupaten Kawawang sebesar 82,2% Hal ini dapat disimpulkan bahwa pimpinan pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten karawang mampu menciptakan lingkungan yang mendorong perilaku positif, mengambil tindakan tegas atas pelanggaran yang terjadi, memiliki

rencana dalam mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem akuntansi, pimpinan telah memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko dilaksanakan dengan efektif dan efisien, dan selalu melakukan evaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan.

5. Penerapan kompetensi sumber daya sebesar 81,8% Hal ini dapat disimpulkan bahwa anggota pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang telah memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan dalam membuat laporan keuangan serta dapat diandalkan dan menolak adanya gratifikasi yang terjadi serta berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- B. Berdasarkan pengujian secara simultan, Penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- C. Berdasarkan pengujian secara parsial dapat disimpulkan sebagai berikut:
 1. Penerapan standar akuntansi pemerintah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga semakin tinggi penerapan SAP akrual, semakin besar pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.
 2. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
 3. Penerapan sistem pengendalian internal tidak memberikan pengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada Kabupaten Karawang belum memadai dalam membuat dan menggunakan dokumen dan saat ini laporan keuangan belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat sehingga sistem pengendalian internalnya tidak berjalan dengan baik.
 4. Penerapan Kompetensi Sumber Daya manusia tidak memberikan pengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

VI. SARAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya untuk mengembangkannya. Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

- A. Aspek Teoritis. (a). Penelitian ini menguji korelasi antara variabel dengan menghubungkannya pada teori stewardship. Pembahasan teori ini dapat menjadi pertimbangan penelitian selanjutnya dengan menggunakan beberapa rujukan teori untuk lebih memperkaya literasi mengenai kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. (b). Pengembangan penelitian diperlukan dalam penggunaan variable lain atau menggunakan variable moderasi dan mediasi, melibatkan lebih banyak SKPD untuk lebih mengembangkan penelitian secara teori.
- B. Aspek Praktis. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2021 harus dapat lebih konsisten dalam memperbaiki sistem pengendalian internal dan peningkatan kemampuan SDM. Perbaikan pada sistem pengendalian internal dan SDM tersebut dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Karawang secara menyeluruh.

REFERENSI

- Armando, G. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Bagjana, I. F., & Rachman, A. A. (2021). Factors Affecting the Quality of SKPD Financial Reports in Cimahi City Local Government. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 13(13), 300–313.
- Bachtiar, Iqbal Maulana. (2022). Setengah Miliar Lebih Proyek Disdikpora Karawang Jadi Temuan BPK RI. <https://karawang.inews.id/read/109787/setengah-miliar-lebih-proyekdisdikpora-karawang-jadi-temuan-bpk-ri>. Diakses pada 22 September 2022.
- BPK. (2022). <https://jabar.bpk.go.id/enam-pemerintah-daerah-di-provinsi-jawabarat-raih-kembali-wtp/>. Enam Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat Raih Kembali WTP. Diakses pada 23 Juli 2022.
- Damayanti, I. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Sistem Akuntansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 95–102. <https://doi.org/10.22225/kr.12.1.1852.95-102>
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64.

- Dharmawan, T., & Supriatna, N. (2016). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 4(1).
- Diani, D. I. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hanifa, L. (2016). Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1, 65–80.
- Jauhari, H., Dewata, E. D., & Suhairi Hazisma. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 104–121. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2569>
- Kiranayanti, I., & Erawati, N. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(2), 1290–1318.
- Mahtovani, D. M., & Hapsari, D. W. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *eProceedings of Management*, 7(3).
- Nilamsari, Y., Sukesti, F., Alwiyah, A., Hanum, A. N., & Santoso, R. E. W. A. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi OPD Kota Semarang. *MAKSIMUM*, 10(2), 85-94.
- Nugraheni, P., & Subaweh, I. (2008). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 13(1), 48–58.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Putra, D. (2013). Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Purba, R. B. (2018). ... *Keuangan Daerah, Transparansi Publikdan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah*.
- Purba, B., Chamidah, Di., Faza, I., Sudarmanto, E., Manullang, S. O., Bintarawati, F., & Fransisco, R. (2021). *Hukum Komersial; Teori, Konsep dan Gagasan*. Yayasan Kita Menulis.
- Sadat, A. (2020). *Governmental Accounting*. Deepublish.
- Sudaryana, B., & Agusiady, R. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Deepublish.
- Yusup. (2021). *Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi*. CV. LD Media.